

Proses Demokratisasi Budaya Indonesia

Demokrasi wujudnya adalah "Pemerintahan oleh Rakyat". Dan proses demokrasi adalah suatu proses kebudayaan, konon, Demokrasi adalah dari proses dialog filsafat dan suatu upaya dialektika dari masyarakat.

Menurut Umar Kayam, ada dua pola budaya tradisi yang melekat pada masyarakat Indonesia. Budaya pertama tradisional masyarakat puak, dan budaya pertanian tradisional masyarakat kerajaan. Namun, ada tradisi yang merupakan warna budaya yang riil dalam kanvas besar kebudayaan kita yang luput dari bacaan banyak pemimpin kita, yaitu tradisi feodal-aristokrasi yang diwariskan oleh kerajaan-kerajaan absolut, kemudian disokong oleh Pemerintah beamb tenstaat Hindia Belanda. Ada kecenderungan untuk melihat kedudukan kekuasaan yang harus kemilau, gumebyar, serta mampu mengangkat keluarga jaringan.

Tapi yang penting menurut dia, tradisi "berembuk", perlu ditumbuh kembangkan, yaitu membuka kesempatan upaya pemasyarakatan berembuk, "berbicara secara terbuka". □

Umar Kayam

Kepala Pusat Penelitian Kebudayaan Universitas Gadjah Mada



Umar Kayam lahir di Ngawi, Jawa Timur, 30 April 1932, mendapat gelar doktor dalam bidang sosiologi dari Cornell University, AS, 1965. Tahun 1966-1969 menjadi Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film, Departemen Penerangan; 1969-1974 menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta; 1975-1977 sebagai Kepala Pusat Latihan Penelitian Ilmu Sosial di Ujung Pandang; menulis beberapa buku tentang kebudayaan; serta menjadi pengajar pada Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM.

Demokrasi, pemerintahan oleh rakyat itu, adalah cermin dari suatu proses budaya dalam usaha menjabarkan konsep kekuasaan dari masyarakat. Kebudayaan, yang pada hakekatnya adalah suatu upaya dialektis dari masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan kepadanya pada setiap tahap kemandirian perkembangannya, memberi ruang gerak yang cukup luas kepada masyarakat untuk sewaktu waktu mengkaji kemandirian tersebut. Maka apa yang disebut sebagai proses demokrasi adalah suatu bagian dari proses kebudayaan karena ia merupakan kekuatan yang menggerakkan proses membentuk sosok baru dari suatu konsep kekuasaan yang dianggap dapat menggantikan konsep lama yang dirasakan telah usang oleh suatu masyarakat. Demikianlah negara kota Athena di Yunani melahirkan konsep "demokrasi" dari suatu proses dialog filsafat antara para warganya yang agaknya memiliki tradisi yang kuat dalam berfilsafat dan bertukar pikiran. Dengan tradisi tersebut negara kota yang kecil itu berhasil melaksanakan konsep yang mereka sebut sebagai "pemerintahan (atau kekuasaan) oleh rakyat". Demikian pula demokrasi borjuasi negara negara Barat lahir dan berkembang lewat proses revolusi Puritan di Inggris, revolusi Perancis dan Perang Saudara Amerika. Semua proses proses tersebut adalah bagian dari suatu proses transformasi budaya.

Adapun transformasi budaya tersebut, pada hakekatnya, adalah transformasi dari suatu masyarakat pertanian yang dikuasai oleh pemilikan lahan-lahan pertanian yang luas yang terdiri dari para bangsawan, para *nobility* (di Inggris dan Perancis), menuju ke masyarakat yang berdagang. Masyarakat berdagang tersebut mula mula terdiri baik dari para tuan-tanah yang kemudian berdagang maupun para pedagang kota yang mengatur perdagangan ekspor dari para tuan tanah tersebut. Mereka berkembang menjadi kekuatan yang men-check kekuasaan absolut dari raja dan semakin banyak menuntut kebebasan bergerak dari raja. Sementara itu mereka juga menekan para petani mencegah mereka untuk tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang berarti. Kekuatan yang berdagang, yang memegang uang dan modal, itulah yang kemudian kita kenal sebagai kaum borjuasi atau kaum borjuis. Kekuatan inilah yang menghidupkan dan mengembangkan kembali konsep "pemerintahan oleh rakyat" meskipun di Inggris usaha tersebut selalu dilaksanakan dalam upaya mengimbangi atau mencegah kekuasaan raja menjadi kekuasaan yang absolut. *Magna Carta* yang dipaksakan oleh para *baron* kepada Raja John pada tahun 1215 di Inggris pada hakekatnya adalah upaya menjabarkan konsep tersebut. Mungkin karena tradisi tersebut serta berbagai perang saudara besar atau kecil yang dialami negeri itu, perkembangan kultur demokrasi di negeri tersebut berjalan dengan lebih tenang bila dibandingkan, misalnya, dengan Prancis di mana revolusinya membatat dengan tuntas akar sistem kerajaan.

Bagaimanapun nuansa proses terjadinya konsep demokrasi modern

atau Barat tersebut, agaknya, pergulatan dan kemudian pergeseran antara budaya pertanian yang menekankan pada budidaya penggarapan lahan dan mengembangkan ekonomi dari sana dengan kaum borjuasi yang ingin mengembangkan ekonomi dari perdagangan adalah yang menjadi unsur dinamika terpenting dari proses demokrasi tersebut. Kaum borjuasi adalah penyebar virus demokrasi di Barat. Agaknya irama kaum yang menggerakkan modal yang ingin selalu adanya kebebasan bersaing, sangat sadar dan berkepentingan adanya jaminan akan kebebasan bersuara dibanding dengan kaum modal di dunia pertanian yang puas dengan privilege yang mereka dapat dari kerajaan. Konfrontasi antara kaum modal pertanian dengan kaum borjuasi tersebut mengambil bentuk dengan lebih nyata pada waktu kaum borjuasi ikut mengembangkan industri. Perang Saudara di Amerika, *the American Civil War*, adalah kulminasi konflik antara modal pertanian melawan modal industri. Demokrasi borjuasi Barat yang berkembang lewat Inggris, Prancis dan Amerika Serikat ternyata telah memiliki latar belakang perkembangan budaya dan tradisi yang panjang, berproses dalam kurun waktu berabad abad.

Kemudian jangan dilupakan pula bahwa virus demokrasi Barat tersebut telah tertanam pula pada waktu kaum Protestan melepaskan dirinya dari hegemoni gereja Katolik. Keinginan untuk memilih agama secara bebas dengan segala ekor konflik konflik bersenjata maupun exodus para pemeluk ke negeri lain adalah juga unsur penting dalam perkembangan paham demokrasi Barat tersebut. Argumen-tasi Max Weber, yang kini telah menjadi klasik, bahwa semangat Protestan

yang menjiwai tumbuhnya kapitalisme Barat, kiranya tidak terlepas dari proses penempaan semangat demokrasi Barat tersebut.

Ada dua pola dasar budaya tradisi yang kita kenal di Indonesia. Yang *pertama* adalah budaya pertanian tradisional masyarakat puak. Yang *kedua* adalah budaya pertanian tradisional masyarakat kerajaan. Karena Indonesia adalah suatu kepulauan tentulah kita kenal juga masyarakat masyarakat kelautan atau masyarakat maritim. Namun bagaimanapun masyarakat maritim tersebut ada yang sempat berkembang sebagai kerajaan seperti Sriwijaya dan mungkin juga Makassar dan Bugis selalu saja mereka tidak pernah lepas dari ikatannya dengan garis belakang masyarakat pertanian. Yang terutama membedakan budaya pertanian tradisional puak dengan budaya pertanian tradisional kerajaan tentulah tingkat perumitan dari kebudayaan tersebut. Dari persamaan pokok atau mungkin juga dasar di mana mereka melihat masyarakat tempat mereka hidup sebagai suatu jagad, suatu kosmos, yang utuh di mana masing masing unsur yang menyangga berkewajiban menjaga keselarasan, harmoni, antara mereka agar jagad tersebut tidak hancur berantakan, kedua sosok masyarakat pertanian tersebut bergeser menjadi berbeda dalam meletakkan makna keselarasan hubungan antara unsur yang menyangga. Pada waktu kedua pola tersebut masih sama sama belum kenal dengan sistem kekuasaan kerajaan, jagad atau kosmos tersebut mereka bayangkan sebagai "bulat". Namun pada waktu sistem kerajaan mulai dikembangkan jagad tersebut berubah menjadi "bulat yang bertitik pusat" atau bahkan menjadi berbentuk "kerucut". Keselarasan pada

jagad yang "bulat" adalah keselarasan yang bulat juga. Artinya keselarasan tersebut adalah keselarasan yang disangga bersama. Sedang pada jagad yang "bulat yang bertitik pusat" atau "kerucut" tersebut harmoni atau keselarasan tersebut menjadi hirarkis, berjenjang jenjang. Titik pusat adalah raja dan kraton di mana dan dari mana keseimbangan jagad itu berada. Raja adalah dewa raja pada waktu zaman Hindu dan kalifatullah pada waktu zaman Islam. Raja adalah titisan dewa atau utusan Allah yang sudah tentu tidak mungkin dapat berbuat salah. Dengan lain perkataan kekuasaan raja-raja di kerajaan kerajaan adalah absolut meskipun dari padanya diharapkan pengayoman dan keadilan. Raja-raja Mataram, misalnya, diharapkan dapat selalu berpegang pada *Hasta Brata* atau delapan sifat dan ciri dari delapan dewa. Kajaolalido, negarawan Bugis, menasehati rajanya dalam *Latoa*, pustaka klasik kerajaan Bone, bagaimana dapat tampil sebagai seorang raja yang adil dan mengayomi rakyatnya. Nasehatnya berlainan betul dengan nasehat Niccolo Machiaveli dalam *Il Principe* yang bernada dingin dan sinis dalam menggauli kekuasaan dan mengembangkan seni memerintah.

Anggota masyarakat pertanian tradisi puak mempunyai hak yang sama di dalam masyarakat dan dipimpin oleh musyawarah tua-tua atau orang orang bijaksana masyarakat. Keputusan keputusan tentang segala aspek menjaga harmoni jagad diambil lewat persetujuan bersama, mufakat, konsensus di dalam musyawarah tersebut. Kerapatan nagari, rembuk desa, musyawarah subak, adalah forum forum musyawarah tersebut. Tradisi berembuk serta perwakilan mungkin dalam masyarakat pertanian tradisio-

nal karena baik jangkauan geografi maupun jangkauan persoalan serta jumlah populasi adalah kondusif untuk budaya semacam itu. Luas lingkungan puak tidak terlalu besar, jumlah populasi juga belum mengalami peledakan serta persoalan-persoalan yang mesti dipecahkan juga masih terbatas pada masalah masalah pertanian serta jaringan keluarga. Semacam prinsip demokrasi sederhana, agaknya, memang telah hadir sebagai akar budaya dalam masyarakat pertanian tradisi kita. Meskipun mungkin demokrasi (dalam pengertian tradisi berembuk) pada masyarakat masyarakat tersebut belum mencapai kecanggihan, sofistikasi, demokrasi negara kota Athena pada ribuan tahun yang lalu di mana raksasa-raksasa pemikir seperti Socrates, Plato (yang menolak prinsip demokrasi) dan Aristoteles (yang melihatnya sebagai sistem yang paling sedikit mengandung kejahatan) hidup, namun itu tidak berarti bahwa tradisi berembuk dari masyarakat pertanian tradisional kita yang sederhana tidak mengenal dengan perkembangan sofistikasi. Budaya Minangkabau jelas menunjukkan perkembangan tersebut.

Di dalam masyarakat pertanian tradisional kerajaan terjadi stratifikasi sosial yang lebih hirarki. Dalam kerajaan Mataram, misalnya, raja berada di puncak, kemudian di bawahnya berturut-turut adalah para bangsawan, priyayi yang merupakan elit birokrasi, pedagang, petani yang sering juga dikategorikan sebagai *wong cilik*, orang kecil. Sudah tentu jelas disitu bahwa anggota masyarakat tidak memiliki hak dan derajat yang sama. Raja memiliki kekuasaan yang absolut, para kerabat raja serta para bangsawan ikut menikmati keabsolutan kekuasaan raja, para priyayi yang

merupakan *soko-guru* birokrasi kerajaan melaksanakan kebijaksanaan dan kemauan raja, para pedagang (terutama di pesisir) berdagang di bawah pengawasan ketat para birokrat dan penguasa wilayah pantai, para petani selalu harus siap pula menggarap tanah milik para bangsawan, priyayi serta para tuan tanah desa. Meskipun terjadi variasi dan nuansa dalam stratifikasi sosial di antara kerajaan-kerajaan di Indonesia kiranya prinsip dasar bahwa masyarakat dibagi dalam lapisan-lapisan hirarkis yang memuncak pada sang raja berlaku sama.

Konsep harmoni pada masyarakat pertanian tradisional puak yang pada dasarnya adalah sederhana karena didukung oleh faktor-faktor yang sederhana pula berjalan dengan aman dan mulus berdasar atas prinsip berembuk, mengatur bersama-sama. Meskipun demikian itu tidak berarti bahwa usaha menggalang dan mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam masyarakat tersebut tanpa kerumitan dan sofistikasi. Hal itu, agaknya, akan tergantung dari tradisi bidang-bidang lainnya dalam masyarakat. Masyarakat Minangkabau, misalnya, memiliki tradisi "berbahasa" dan berceritera yang kuat. Pandai menggunakan bahasa serta "bersilat kata" adalah kecakapan yang dinilai tinggi dalam masyarakat Minangkabau. Maka dapat dibayangkan akan bagaimana ramai, riuh, serta seronok suasana kerapatan serta musyawarah mereka. Semangat berembuk dalam masyarakat Minangkabau pastilah berjalani dengan retorika yang canggih.

Konsep harmoni yang hirarkis pada kerajaan Jawa (mungkin juga pada kerajaan Bali, Aceh, Makasar dan Bone) tidak sederhana. Sesuai dengan sistem kepercayaan yang magis-religius serta sistem kekuasaan yang

absolut kerajaan Jawa membutuhkan kerumitan skenario untuk melestarikan sistem kepercayaan yang demikian dan sekaligus sistem kekuasaan. Keselarasan dan keseimbangan, pada hakekatnya, adalah memelihara keselarasan dan keseimbangan rakyat dengan sang raja. Dan karena sang raja adalah pusat segalanya maka memelihara keseimbangan dan keselarasan dengan sang raja adalah sama dengan memelihara hubungan harmonis tersebut dengan jagad semesta. Maka di sini tradisi berembuk tidak berlaku. Kalau toh berlaku perembukan tersebut adalah perembukan "kontekstual". Artinya perembukan tersebut terkotak kotak dalam berbagai strata yang semuanya dalam rangka mencapai harmoni dengan raja dan kraton. Maka skenario tersebut dijabarkan lewat berbagai cabang atau unsur kebudayaan. Bahasa dirumitkan menjadi tingkat tingkat bahasa dan kehalusan mempergunakan bahasa diukur dengan ketrampilan menggunakan tingkat tingkat tersebut pada tempatnya. Semua ekspresi kesenian berorientasi kepada konsep harmoni "bersatunya rakyat dengan raja".

Pada waktu pemerintahan Hindia - Belanda, strategi pokok dari pemerintahan tersebut adalah membangun suatu *beambtenstaat*, suatu negara birokrasi, dan menarik garis status quo dengan pedesaan untuk tidak diusik kondisinya. Meskipun para negarawan dan arsitek pemerintahan Hindia - Belanda pada abad 19 dan 20 tersebut adalah ahli waris dari budaya pemikiran borjuasi Barat yang liberal namun demi efektifnya roda pemerintahan jajaran tersebut mereka secara oportunistis menerapkan atau melanjutkan tradisi "memelihara harmoni kerajaan" dengan baju suatu *beambtenstaat*. Model *beambtenstaat* terse-

but adalah suatu negara birokrasi, tanpa suatu klas menengah bibit borjuasi, tanpa suatu kondisi pra-industri, bahkan tanpa tuan-tanah yang menguasai lahan-lahan pertanian yang luas dan kuat ekonominya.

Presiden Soekarno melakukan suatu "coup konstitusi" dengan melancarkan suatu Dekrit Presiden 5 Juli 1959 di mana beliau membubarkan Konstituante dan mengumumkan kembali berlakunya UUD 1945. Beberapa tahun sebelumnya Bung Karno telah mempersiapkan dan melemparkan gagasan beliau tentang Demokrasi Terpimpin dan kemudian menjabarkannya dalam apa yang kemudian disebut sebagai Konsepsi Presiden. Terlepas dari apakah hal tersebut merupakan suatu strategi dan maneuver politik yang cerdas dan lihay dari

seorang pemimpin politik yang ambisius yang merasa terpenjara dalam kedudukannya sebagai presiden konstitusional dalam UUD 1950, premis premis yang beliau ajukan dalam Konsepsi tersebut adalah suatu "bacaan kultural" yang menarik. Dalam Konsepsi dan konsep demokrasi terpimpin tersebut beliau melihat dan menyimpulkan bahwa selama ini kita telah keliru dengan menerapkan demokrasi parlementer Barat yang liberal. Demokrasi tersebut tidak cocok dengan kepribadian kita karena demokrasi dengan model tersebut telah menyebabkan suasana "gontok gontokan"

antara kekuatan kekuatan politik di parlemen. Beliau mengajak untuk meninggalkan demokrasi ala Barat tersebut dan berganti dengan demokrasi terpimpin yang diilhami oleh demokrasi pedesaan yang mendasarkan pada musyawarah dan mufakat. Keputusan keputusan dalam demokrasi terpimpin diambil lewat musyawarah

terus menerus sampai tercapai mufakat sedang keputusan demokrasi liberal diambil lewat pertentangan. Kemudian beliau mengajak untuk membentuk kabinet "empat kaki" yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU dan PKI, partai partai yang terbesar dan muncul sebagai pemenang dalam pemilu tahun 1955. Dengan begitu, menurut beliau, "semua anggota keluarga duduk bersama di seputar meja makan".

"Bacaan kultural" semacam itu sesungguhnya bukan sesuatu yang baru sekali itu dilakukan. Bersama Bung Hatta, Soepomo dan lain-lain anggota bapak pendiri republik kita ini yang tergabung dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, Soekarno juga telah mengadakan "bacaan kultural" waktu mereka menyiapkan penyusunan UUD 1945.

Ada beberapa hal yang agaknya pantas dicatat tentang "bacaan kultural" tersebut. Yaitu keinginan sementara pemimpin kita mengacu kepada sistem nilai tradisi kita dalam usahanya menjabarkan pemahaman demokrasi yang sesuai bagi negara kita.

Hal tersebut jelas tercermin dalam UUD 1945, Pancasila dan konsepsi presiden Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin. Ilham tersebut terutama mengacu kepada tradisi masyarakat pertanian puak di mana jagad itu dipandang sebagai bulat sosoknya dan harmoni itu dicapai lewat dialog-dialog musyawarah dan mufakat. Akan tetapi tradisi "masyarakat berembuk" yang bagaimana yang sesungguhnya diacu? Tradisi "masyarakat berembuk" yang penuh dengan silat kata, kembang kembang bahasa dan retorika seperti di budaya Minangkabau ataukah tradisi "masyarakat berembuk" yang tidak terlalu

"ribut" seperti desa-desa di Jawa dan Bali dan mungkin juga di wilayah Makassar dan Bugis? Menilik retorika Soekarno dalam Konsepsi Presiden, agaknya, beliau tidak mengacu kepada "masyarakat berembuk" yang penuh dengan retorika tetapi lebih condong kepada "masyarakat berembuk" yang tidak terlalu "ribut". (Barangkali bukan satu kebetulan apabila penolakan yang paling vokal terhadap Konsepsi Presiden waktu itu datang dari seorang Mohamad Natsir - seorang wakil budaya dari "masyarakat berembuk" yang penuh dengan silat kata dan retorika itu.)

Akan tetapi "bacaan kultural" tersebut belum lengkap. Ada satu tradisi lagi yang merupakan warna budaya yang riil sekali pada kanvas besar kebudayaan kita yang luput dari bacaan banyak pemimpin kita. Yaitu tradisi feodal-aristokrasi yang diwariskan oleh kerajaan kerajaan absolut kita di kepulauan kita ini yang kemudian disokong oleh pemerintahan *beambtenstaat* Hindia Belanda. Hal ini mungkin pantas dipertimbangkan untuk "dibaca" karena juga tradisi ini memiliki akar budaya yang kuat di negeri kita terutama di wilayah wilayah budaya bekas kerajaan. Kebiasaan untuk nyaris otomatis memberikan keabsahan dan pembedaan kepada apa yang diucapkan oleh para pemimpin; kecenderungan untuk menuntut penggunaan *euphemisme* yang berlebihan sebagai ciri kehalusan dan sofistikasi; kecenderungan untuk takut kepada risiko konflik bukan karena takut merusak harmoni hubungan dengan sesama manusia, melainkan takut akan risiko merusak hubungan dengan sistem kekuasaan; kecenderungan untuk melihat kedudukan kekuasaan sebagai kedu-

dukan yang harus "kemilau", harus "gumebyar", serta mampu mengangkat keluarga jaringan. Itulah beberapa misal ciri-ciri tradisi masyarakat pertanian tradisional kerajaan. Hal tersebut pantas diperhitungkan dalam "bacaan kultural" bukan untuk diserap dalam penentuan sosok dan warna demokrasi kita melainkan untuk (sekali lagi) diperhitungkan justru karena masih sangat kuat akar-akarnya.

Tradisi "berembuk" adalah tradisi yang baik. Ia adalah modal yang baik bagi pertumbuhan demokrasi karena ia mendorong manusia warga masyarakat untuk mau berbicara, mengutarakan pendapat, mengutarakan persetujuan, mengutarakan ketidaksetujuan atau kejengkelan. Dengan demikian baik tradisi "masyarakat berembuk" yang "ribut" maupun yang "tidak terlalu ribut" sama-sama penting dalam mengembangkan tradisi demokrasi yang (sekali lagi) bermakna "pemerintahan (atau kekuasaan) oleh rakyat". Tradisi feodal aristokrasi harus kita tinggalkan karena konsep budayanya yang mengacu kepada harmoni yang hirarkis itu akan merupakan kendala yang serius terhadap penggalangan sikap yang demokratis, yang egaliter, yang melihat manusia dilahirkan dengan hak yang sama.

Kita sudah bertekad untuk melakukan transformasi budaya dari yang agraris tradisional menuju ke budaya yang industri modern. Akan tetapi tekad tersebut bukanlah tekad pengembangan modernitas dari atas yang mengabaikan demokrasi. Memang jalan modernitas dari atas dulu pernah menghantar Jerman dan Jepang ke tahapan modernitas yang mengagumkan. Namun alangkah mahal juga bayaran yang telah harus mereka keluarkan untuk jalan tersebut pada perang dunia ke satu dan ke

dua sehingga mereka sekarang harus mengejar ketinggalan mereka dengan belajar dari depan mengembangkan masyarakat yang demokratis.

Mungkin benar kata sementara pengamat sosial dan politik bahwa dunia ketiga beruntung justru karena posisi mereka yang ketinggalan. Artinya kita tidak usah harus mengulang pengalaman pahit serta kesalahan yang menyakitkan dari negara-negara maju. Dalam konteks mengembangkan kultur demokratis mungkin ini berarti bahwa kita tidak harus mengalami atau menciptakan konflik antara kekuatan modal pertanian melawan modal industri. Bahkan mungkin tidak usah harus memilih borjuasi sebagai motor dinamika demokrasi. Hal-hal tersebut, kekuatan modal dan kekuatan modal industri serta borjuasi, memang tidak atau mungkin lebih tepat belum hadir di tengah-tengah kita. (Tanda-tanda kehadiran mereka harus diakui memang telah nampak).

Mungkin yang segera harus kita lakukan dalam proses demokrasi ini adalah menghidupkan serta mendorong maju tradisi "masyarakat berembuk" kita. Yang telah memilikinya dan mampu selama ini mempertahankan tradisi "berembuk" itu biarlah hal tersebut terus hidup. Yang belum terbiasa "berembuk" haruslah kita ciptakan kultur "berembuk" tersebut. Sistem nilai feodal aristokrasi yang tidak kenal kultur "berembuk" mestilah kita beri porsi yang kuat untuk mau menelan budaya "berembuk" tersebut.

Saya melihat, menafsirkan, pemasyarakatan UUD 1945 dan Pancasila sebagai upaya pemasyarakatan semangat budaya "berembuk", "berbicara secara terbuka". Pemasyarakatan cita demokrasi. ☆